

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN TURKI DAN KURDI

Bab ini merupakan penjabaran mengenai dinamika hubungan antara Turki dan Kurdi, meliputi sejarah keberadaan etnis Kurdi di Turki kemudian lanskap pembentukan PKK, serta secara khusus membahas hubungan antara kedua entitas politik dalam era pemerintahan Recip Tayyip Erdogan.

A. Sejarah Kurdi Turki

Kurdi adalah sebuah kelompok etnis Arya atau Iranian dengan ras Indo-Eropa yang hidup tersebar di beberapa Negara di dunia khususnya di Timur Tengah yakni di wilayah Gunung Taurus di Turki, Gunung Zagros di Iran, disebagian wilayah Irak Utara, Syria, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Lebanon dan Eropa. Mereka telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kerajaan Persia dan Ottoman yang kini menjadi Iran dan Turki modern.¹³

Kurdi dahulunya menempati wilayah batas kerajaan Persia dimana pada masa tersebut terjadi penaklukan Islam. Sejak 21 H, mayoritas masyarakat Kurdi berbondong-bondong memeluk Islam dikala penaklukan oleh Islam dilakukan. Pun, salah satu tokoh heroik Islam yakni Salahudin Al-Ayyubi sang pembebas Baitul Maqdis adalah seorang Kurdi. Pasca penaklukan yang dimulai dari sungai Efrat hingga Azerbaijan tersebut membuat populasi Kurdi

¹³ Everyculture, Countries and Their Culture : Kurds, diakses dari <http://www.everyculture.com/wc/Tajikistan-to-Zimbabwe/Kurds.html> diakses pada 5 Desember 2017

muslim mulai tersebar menjamur, hingga ke Ottoman Empire yang kini menjadi Turki di era Modern¹⁴.

Akan tetapi jumlah mereka yang banyak tidak membuat mereka menjadi mayoritas di Negara-Negara persebarannya. Kurdi justru menjadi minoritas yang mewakili bahasa, budaya dan identitas yang mereka percayai di berbagai Negara tersebut. Hingga kini tercatat kebanyakan dari mereka adalah muslim Sunni taat, sebagian lagi adalah Yudaism dan Kristiani, serta beberapa kelompok kecil yang tergabung dalam kumpulan sekte mistis. Kurdi sendiri menggunakan bahasa Kurdi yang berhubungan dengan bahasa Persia serta bahasa Pastho sebagai alat komunikasi.

Dalam perkembangannya Kurdi tumbuh dan menjadi suku bangsa terbesar keempat didunia, namun ironinya mereka tidak memiliki Negara berdaulat. Dengan jumlah populasi yang sangatlah banyak membuat mereka seharusnya menjadi begitu superior ketika dipersatukan dalam konsep Negara bangsa. Terkatung-katung diberbagai belahan dunia, dilenyapkan karena dianggap sebagai ancaman, identitas dihilangkan, teritori dan budaya tidak diakui serta pembantaian massal mewarnai perjalanan Kurdi. Faktor-faktor tersebut kemudian menumbuhkan semangat nasionalisme Kurdi untuk membentuk Negara Sosialis Kurdistan di Turki, Iran, Irak dan Suriah.¹⁵

¹⁴ Kiblat, Kiblat : Sejarah Kurdi Era Khalifah, diakses dari <https://www.kiblat.net/2014/10/30/ini-sejarah-Kurdi-sejak-era-khalifah-rasyidah-sampai-revolusi-suriah/> diakses pada 5 Desember 2017

¹⁵ BBC, World News : Who are the Kurds?, diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29702440> diakses pada 5 Desember 2017

(Gambar 1.1 Wilayah Geografis Kurdistan)



Sumber : Kurdistan, Turkish News¹⁶

Sejak awal abad 20 tepatnya pasca meletusnya perang dunia pertama Kurdi telah menjajaki peranan guna menjadi Negara merdeka. Pada tahun 1916 diawali dengan perjanjian “*Sykes-Picot*” yang mengatur mengenai sistem zonasi pembagian wilayah antara Inggris dan Perancis para Kurdi telah memulai menghimpun kekuatan bersama.¹⁷ Terlebih pada 1920 dikala Traktat Sevres dibubuhkan sebagai konsekuensi dari runtuhnya Ottoman Empire, para Kurdi semakin mendapat angin segar, sebagaimana termaktub dalam Traktat Sevres yang secara orisinil tertuang janji dari *Tripplé Entente* yakni Inggris, Perancis dan Rusia bahwa Kurdi akan mendapatkan pengakuan serta wilayah sebagai sebuah Negara merdeka yang ditandatangani pada 10 Agustus 1920.

Traktat tersebut semakin membakar semangat nasionalisme Kurdi, berbagai Negara timur

¹⁶ Turkish News, World Turkish Coalition : Kurdistan, diakses dari <https://www.Turkishnews.com/en/content/tag/kurdistan/> diakses pada 5 Desember 2017

¹⁷ Council Foreign Relations, Interactives : The Time of the Kurds, diakses dari <https://www.cfr.org/interactives/time-kurds#1/#who-are-the-kurds> diakses pada 5 Desember 2017

tengah bergejolak dengan tuntutan Kurdi mulai dari hak politik, otonomi hingga independensi, terutama Kurdi di Turki yang sangat vokal menyuarakan pemisahan diri dengan Turki. Kurdi Turki sendiri merupakan kelompok Kurdi mayoritas yang mulanya terpusat di Iran. Harapannya adalah untuk menyebarkan semangat nasionalisme Kurdi dan semakin mempermudah proses kemerdekaan Kurdistan, Negara yang mereka idamkan.

Namun faktanya, isi dari Traktat Sevres yang cenderung merugikan Turki karena berisi berbagai pembatasan-pembatasan seperti pembatasan Angkatan Perang yang tidak boleh melebihi jumlah 50.000 orang, pembatasan persenjataan, kemudian Klausul Keuangan dimana Turki harus menerima pengawasan ketat dari Komisi Keuangan yang mewakili *Entente* terhadap anggaran Negara, pajak langsung, pabean, konsesi dan pinjaman umum, kemudian Kapitulasi atau pengakuan kalah perang terhadap *Entente* serta pengakuan terhadap minoritas bangsa Armenia, Yunani, Asiro-Kaklea dan Kurdi, tidak lantas membuat Turki merespon baik diaspora Kurdi serta penduduk Kurdi yang telah menetap di wilayah Ottoman sebelumnya, tepatnya disekitar dataran tinggi gunung Taurus dengan tinggi 6000 kaki atau 1.950 meter. Traktat tersebut justru menjadi biang kemarahan rakyat Turki. Mereka menganggap bahwa Traktat ini menghina bangsa Turki dan menurunkan status Turki dari yang sebelumnya merupakan Negara *superpower* menjadi sebuah Negara kecil, Traktat ini dianggap bukan sebagai solusi konflik melainkan sebagai jalan awal munculnya konflik baru.¹⁸ Hal ini dibuktikan dengan

¹⁸ United Kingdom, UK Gov : Treaty Sevres, diakses dari <http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/TS0011.pdf> diakses pada 5 Desember 2017

pecahnya perang antar pasukan sekutu dan Yunani melawan Turki dibawah pimpinan Mustafa Kamal. Dimana perang ini berakhir dengan kemenangan mutlak Turki dan kesepakatan Traktat baru untuk menggantikan Traktat Sevres, Traktat ini dinamakan sebagai Traktat Laussane, yang juga berdampak pada eksistensi Kurdi di Turki.

Dalam Traktat Laussane sendiri tertuang berbagai poin yang menegaskan eksistensi Turki dan dianggap mampu menaikan kembali derajat rakyat Turki. Seperti kembalinya Thracia Timur (wilayah sekitar Konstantinopel) ke Turki, tidak adanya kapitulasi perang, Turki tidak perlu membatasi jumlah angkatan perang, tidak adanya ganti rugi pasca perang dan Turki akan melindungi minoritas, serta poin-poin lain seperti Turki akan melepaskan daerah kependudukan yang bukan merupakan bangsa Turki, Bosporus, Marmora dan Dardanola yang sebelumnya eksklusif digunakan dibuka untuk umum, dikembalikannya Lybia, Cyprus, Mesir, Palestina, Trans-Jordan, Syria dan Lebanon serta pemberian kemerdekaan pada daerah-daerah Arabia. Praktis, Turki akan merubah model pemerintahannya yang sebelumnya berlandaskan agama dan kekhalfahan menjadi lebih sekuler.¹⁹ Konstitusi pun ikut berubah, khususnya untuk menjadikan Turki sebagai Negara modern tanpa campur tangan pihak manapun. Sehingga pasca diberlakukannya Traktat Laussane maka bukan hanya pola pemerintahan Turki yang berubah tetapi nasib para Kurdi juga akan sepenuhnya berubah, kemerdekaan yang diidamkan akan semakin sulit tercapai.

¹⁹ United Kingdom, UK Gov : Treaty Sevres, diakses dari <http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1923/TS0016-1.pdf> diakses pada 5 Desember 2017

Dalam implementasinya, gerakan modernisasi Turki mulai dilakukan dengan menjadikan Turki murni yang berarti tidak akan ada sama sekali atribut lain selain Turki, termasuk atribut Kurdi. Hal ini dibuktikan dengan persekusi yang dilakukan kepada para Kurdi dengan membatasi berbagai akses domestik mereka, untuk berpolitik, mengenyam pendidikan, berpendapat dan lainnya. Kurdi dilarang keras menggunakan bahasanya sendiri, siapapun yang melanggar akan dianggap sebagai musuh atau penjahat dan akan dijebloskan ke penjara. Buntut panjang dari tindakan ini adalah dengan pembataian etnis kurdi dalam kurun waktu yang cukup lama. Bahkan guna merealisasikan tujuan tersebut, substansi Traktat Laussane tentang perlindungan kaum minoritas ikut dilanggar.

Semua dilakukan untuk melahirkan Turki modern yang dianggap memiliki kekuasaan absolut, terlebih dengan kondisi Kurdi yang bukan merupakan masyarakat asli Turki yang menjadikan mereka sebagai bulan-bulanan moderninasi Turki dan dilabeli sebagai mayoritas yang tertindas. Perjalanan sejarah panjang yang penuh dengan rintangan tersebut setidaknya menjadi rasionalisasi yang kuat bagi Kurdi untuk berjuang lebih keras mewujudkan kemerdekaan secara komunal, khususnya dari Turki. Inilah yang kemudian menjadi acuan terbentuknya gerakan-gerakan pro kemerdekaan Kurdistan di Turki, salah satunya yakni PKK (Partiya Karkeren Kurdistan).

Tabel 1.2 Tabel Linimasa Perjalanan Kurdi di Turki

Tahun	Peristiwa
--------------	------------------

1916	Kesepakatan sistem zonasi antara Inggris dan Perancis yang merupakan lawan perang Imperium Ottoman terhadap wilayah-wilayah kekuasaan di Timur Tengah melalui perjanjian Sykes-Picot
1918	Kesepakatan gencatan senjata antara Ottoman dan sekutu sebelum dimulainya perundingan damai
1920	Pengesahan Traktat Sevres kala runtuhnya Ottoman Empire dan pasca meletusnya perang dunia I tentang pengakuan terhadap Kurdi dan wilayah Kurdistan
1922	Perang antar Ottoman dengan Yunani atas kesepakatan sekutu yang dimenangkan oleh Ottoman
1923	Pengesahan Traktat Laussane menggantikan Traktat Sevres yang secara parsial menutup jalan kemerdekaan Kurdistan
1924	Deklarasi berdirinya negara Republik Turki, cikal bakal Turki Modern
1925	Upaya modernisasi Turki dijalankan dengan berbagai aksi represif dan persekusi kepada Kurdi

Sumber : Timeline Kurdish Militant Group PKK, Reuters²⁰

²⁰ Reuters, Timeline : Kurdish Militant Group PKK's, three decade war with Turkey, diakses dari <https://www.reuters.com/article/us-turkey-kurds-dates-timeline/timeline-kurdish-militant-group-pkks-three-decade-war-with-turkey-idUSBRE92K0I320130321> diakses pada 5 Desember 2017

B. Lanskap Pembentukan Partiya Karkeren Kurdistan di Turki

Dalam perjuangan panjang memperoleh kemerdekaan dan pengakuan atas bangsanya, Kurdi telah melewati berbagai fase. Mulai kala kekuasaan Ottoman Empire berlanjut pada masa runtuhnya Ottoman Empire, selanjutnya yang terburuk kala proses modernisasi Turki hingga kini pada Era Turki Modern masa pemerintah Recip Tayyip Erdogan. Para Kurdi telah menjadi saksi hidup perjalanan Turki, sehingga mereka adalah bagian tidak terpisahkan dari Turki.

Peta perjuangan Kurdi di Turki dapat dilihat kala proses modernisasi pada masa krisis pengelompokan. Dimana secara intens ditengah upaya pemerintah membangun Negara bangsa modern dengan menekankan pada formasi ideologi sekuler, bahasa dan identitas kultur, Kurdi dihadapkan dengan tidak adanya pengakuan sub-region tempat mereka menetap. Artinya keberadaan mereka sama sekali tidak akui sebagai bagian resmi dari Turki. Hal itu pula yang menyebabkan pada 1939 secara brutal para Kurdi mendapat tindakan represif oleh pemerintah dan membuat mereka dideportasi dan dikelompokan secara homogen di wilayah Barat dan Tenggara Turki.²¹

²¹ BBC, Dunia, Indonesia : Turki minta maaf atas pembunuhan ribuan warga Kurdi, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/11/111127_turkeymasacre diakses pada 5 Desember 2017

Diawal 1960an sejalan dengan kebangkitan Kurdi di sub-regional Irak maka menjadi pemantik pula bagi perkembangan Kurdi Turki yang jumlahnya jauh lebih signifikan, kekuatan mulai dihimpun diwilayah-wilayah strategis dimana mayoritas Kurdi menetap. Muncul organisasi dan gerakan dengan agenda-agenda politik yang dipengaruhi oleh paham gerakan kiri komunisme, layaknya Kurdi di Irak. Ideologi ini dipilih sesuai dengan jalan pikrian sang pemimpin Kurdi masa itu yang cenderung Marxist-Leninist, yakni Abdullah “Apo” Ocallan.

Dibawah pimpinan Abdulah Ocallan pada tahun 1978 Partiya Karkeren Kurdistan didirikan sebagai organsasi bersenjata yang merupakan manifestasi dari keinginan masyarakat Kurdi untuk merdeka.²² Tujuanya jelas untuk mendeklarasikan berdirinya Negara Kurdistan yang meliputi wilayah Turki bagian tenggara, timur laut Irak, timur laut Syria, dan barat laut Iran. Partiya Karkeren Kurdistan menjadi organisasi militan sayap kiri yang diharapkan mampu mengakomodir kepentingan masyarakat Kurdi, khususnya Kurdi Turki.

Ocalan atau akrab disapa sebagai “Apo” atau “Paman” bagi orang Kurdi dikenal sebagai seorang pemimpin Kurdi yang lugas dan cerdas. Dalam masa lalunya, ia pernah mencoba untuk menjadi bagian dari militer Turki namun justru ditolak. Hal ini membuatnya mengambil jalan lain dengan belajar Ilmu Politik yang kemudian mempengaruhi perspektifnya dan menjadikannya seorang Marxist di

²² Enacademic, Historical Dictionary of The Kurds : Ocalan, Abdullah Apo, diakses dari http://kurds_history.enacademic.com/419/Ocalan%2C_Abdullah_%28Apo%29 diakses pada 5 Desember 2017

Universitas Ankara, sebelum akhirnya ia dipenjarakan dan dikeluarkan karena aktifitas kirinya tersebut. Ia kemudian kembali ke Turki Tenggara guna memobilisasi massa dan membentuk Partiya Karkeren Kurdistan.²³

Ocalan memimpin perjuangan kemerdekaan Kurdi bukan hanya semata-mata dilatarbelakangi oleh perbedaan kultural dan identitas antara Kurdi dan Turki yang membuat mereka dulunya kerap kali mendapatkan penindasan dari pemerintah, namun terdapat motif lain yakni perbedaan dalam aspek ideologi, dimana Turki kini cenderung mengedepankan asas modern-sekularisme pasca runtuhnya Ottoman Empire, sementara Kurdi dengan Marxis-Sosialisme.²⁴ Perbedaan ideologi dianggap sebagai perbedaan yang fundamental sehingga membuat kedua entitas tidak dapat menyatu atau berintegrasi.

Partiya Karkeren Kurdistan yang merupakan organisasi bersenjata terorganisir bukan hanya dijadikan sebagai wadah juang untuk menyuarakan pemerolehan hak politik, akses dan informasi sebagaimana yang tidak mereka dapatkan sebelumnya, namun juga telah menjadi lumbung propaganda dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini mereka lakukan dengan cara menyebarkan berbagai berita kepada seluruh Kurdi dunia tentang betapa

²³ Britannica, Biography : Abdullah Ocalan Kurdish Militant Leader, diakses dari

<https://www.britannica.com/biography/Abdullah-Ocalan>
diakses pada 5 Desember 2017

²⁴ Aljazeera, News Europe : Profile Abdullah Ocalan, diakses dari

<http://www.aljazeera.com/news/europe/2013/03/201332114565201776.html> diakses pada 5 Desember 2017

kejarnya pemerintah Turki. Penggiringan opini publik semacam ini telah menjadi salah satu agenda politik regular yang ditujukan agar setiap aktivitas yang dilakukan oleh PKK nantinya mendapat dukungan dan pembenaran, setidaknya dengan rasionalisasi pembelaan hak.²⁵

Gambar 2.1 Milisi Partiya Karkeren Kurdistan



Sumber : White House Calls Turkey's PKK a terrorist Group, World Bulletin²⁶

Selain faktor hak yang dianggap direnggut secara sepihak, perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Turki seperti perubahan kebudayaan yang menjadi semakin kosmopolit, perubahan bahasa serta tata kelola pemerintahan oleh rezim yang cenderung

²⁵ European Strategic Intelligence and Security Center, Publications : PKK Terrorist Organisation : Tactic, Strategy and the Future, diakses dari

<http://www.esisc.org/publications/briefings/pkk-terrorist-organisation-tactics-strategy-and-the-future> diakses pada 5 Desember 2017

²⁶ World Bulletin, Politics : White House Calls Turkey's PKK a terrorist Group, diakses dari

<http://www.worldbulletin.net/news/162429/white-house-calls-turkeys-pkk-a-terrorist-group> diakses pada 5 Desember 2017

buruk, memaksa PKK untuk merubah pola perjuangan, dengan semakin brutal menggunakan kekerasan bersenjata, taktik terorisme dan ancaman lainnya.

Militan PKK menggunakan berbagai metode untuk menebar teror mulai dari serangan pada infrastruktur dan fasilitas publik seperti rumah sakit, sekolah dan ambulans, asset-aset negara seperti kantor pemerintahan, meracuni suplai air minum publik dengan mencampurkan sianida serta penculikan, pembunuhan dan pembantaian warga Turki yang dianggap tidak kooperatif.

Suksesnya PKK menarik perhatian publik domestik serta dunia internasional. Popularitas kelompok teror transnasional ini terdongkrak. PKK kemudian direkognisi sebagai organisasi terorisme internasional oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Rangkaian teror dan tindak kejahatan tersebut menjadi sebuah pembuktian bahwa mereka yang dulunya dikerdilkan sebagai imigran telah bertransformasi menjadi ancaman besar.

Dalam perjalanannya teror masif yang dimotori PKK tidak lepas dari jumlah kapasitas dan kuantitas armada serta persenjataan yang signifikan dan mapan. Sejak awal dibentuk hingga kini, kelompok PKK diyakini memiliki lebih dari sekitar 6000 pasukan yang tersebar diseluruh Turki, yang mana komposisinya didominasi oleh kaum buruh pekerja dan mahasiswa kiri pro Kurdistan. Selain jumlah armada atau tentara, Kurdi juga menjadi superior karena sistem persenjataan yang baik. Mereka memperolehnya dari berbagai aktifitas perdangan, barter serta transaksi ilegal lainnya, sebagaimana diketahui selain aktif sebagai kombatan, anggota PKK juga terlibat dalam berbagai penyelundupan, perdagangan narkoba serta pemerasan untuk memperoleh suplai. Sumber-

sumber dana ini juga diyakani diperkuat oleh Kurdi Irak yang mayoritas menguasai tambang-tambang minyak siap ekspor ke seluruh dunia.

Influensi Ocallyan dan PKK menjadi semakin besar ketika mampu mempengaruhi pergerakan pro Kurdistan serupa yakni Democratic Union Party (PYD) di Suriah dan Party of a Free Life in Kurdistan (PJAK) di Iran. Hal ini membuat pemerintah Turki dibawah kepemimpinan Tanlu Ciller bergerak cepat, alhasil Ocallyan berhasil ditangkap di Nairobi, Kenya pada 15 Februari 1999. Penangkapan tersebut diharapkan mampu mereduksi kekuatan PKK yang sangat patuh terhadap komando dan perintah dari Ocallyan. Pemerintah berjanji akan memperlakukan Ocallyan dengan baik, tanpa kekerasan tidak seperti tahanan-tahanan Kurdi sebelumnya yang dipperlakukan secara tidak manusiawi.²⁷

Sayangnya penangkapan ini tidak bersambut baik oleh PKK maupun rakyat Kurdi, mereka justru melakukan aksi demonstrasi besar-besaran dan meminta agar Ocallyan segera dibebaskan. Demonstrasi menjadi anarki di beberapa kedutaan besar Eropa seperti di London, Wina serta di depan Gedung Putih Amerika Serikat.

Dalam masa penahanan yang dimulai tertanggal 31 Mei, Ocallyan di tempatkan dipenjara Imrali, Laut Marmara. Hal ini karena ia dianggap sebagai salah satu tahanan politik paling berbahaya didunia, terlebih karena vonis yang dijatuhkan kepadanya adalah hukuman mati, menuntut militer Turki harus memastikan bahwa tidak ada sedikitpun kesempatan Ocallyan lepas dari jeratan hukum atas tindakan perlawanannya terhadap negara.

²⁷ Geotimes, Kolom : Menanti Negara Kurdi di Timur Tengah, diakses dari <https://geotimes.co.id/kolom/menanti-negara-kurdi-di-timur-tengah/> diakses pada

Menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepadanya terlalu berat, Ocallyan berinisiatif untuk menghentikan perang antara militan PKK dan Turki serta berencana menginisiasi perundingan damai antar kedua belah pihak. Hal ini tertuang dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh Departemen Perdamaian Sipil yang mengawasi proses perdamaian, yang mana surat tersebut berbunyi : “Kami pejuang (PKK) dan pejabat pemerintah Turki gagal mengelola dan berkomitmen untuk negosiasi perdamaian”.

Surat tersebut dimaksudkan sebagai sinyal kepada seluruh pimpinan, militan, martir hingga simpatisan PKK agar meringankan proses peradilan yang tengah dihadapi Ocallyan. Sekalipun begitu, militan PKK beranggapan bahwa itu hanyalah tipu daya Turki untuk semakin melemahkan PKK, sehingga tidak sedikit yang menolak dengan tegas gagasan Ocallyan untuk melakukan perundingan damai dengan Turki. Namun pada akhirnya besarnya pengaruh Ocallyan terhadap Kurdi membuat proses perdamaian tetap digulirkan. Tindakan heroik tersebut membuat vonis hukuman matinya diringankan menjadi hukuman seumur hidup oleh pemerintah Turki.²⁸

Akhirnya di tahun 1999, tepatnya pada 1 September atau 7 bulan pasca penangkapan Ocallyan, gencatan senjata pertama dilakukan. Walaupun dalam kondisi yang jauh lebih kondusif, namun miitan PKK sama sekali menolak melucuti senjata. Dalam periode ini banyak tahanan Kurdi yang diberikan grasi atau pemangkasan waktu tahanan

²⁸ BBC, Dunia : Abdullah Ocallyan Serukan Gencatan Senjata, diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2013/03/130321_kurdi_coba diakses pada 5 Desember 2017

oleh pemerintah karena dianggap telah bersikap kooperatif.

Selain kesepakatan gencatan senjata, Ocallyan juga melahirkan sebuah ide baru yakni membentuk Republik Demokratis dengan mengubah nama Partiya Karkeren Kurdistan atau PKK menjadi *Kongreya Azadiya u Demokrasiya Kurdistan* atau KADEK yang mengusung – perjuangan kaum Kurdi lewat jalur politik dengan pendekatan yang lebih humanis. Tujuan akhirnya adalah Wilayah Turki tenggara tempat mayoritas Kurdi bermukim akan menjadi wilayah otonomi yang memiliki batas-batas wilayah yang jelas dengan Turki dan dikelola oleh rakyat Kurdi. Minimnya respon dari pemerintah Turki melihat perkembangan dan perubahan PKK membuat para militan secara telak menggugurkan ide tersebut. Hal ini diperparah dengan deklarasi untuk menghentikan gencatan senjata dan kembali memulai konflik. Secara resmi, gencatan senjata pertama akhirnya berakhir pada 1 Juni 2004 PKK.

Sejak gencatan senjata pertama berakhir, tensi konflik mulai memuncak, terlebih pada tahun 2010, 2011 dan 2012 dimana tindakan kekerasan yang dilakukan oleh PKK semakin brutal dengan rentetan teror bom di beberapa sentral pemerintahan Turki seperti di Provinsi Hakkari, Izmir dan Istanbul. Hal ini membuat Turki sempat lumpuh sejenak karena berbagai kekhawatiran. Militer berjaga diberbagai sudut kota, status siaga diberlakukan karena intensitas konflik yang cenderung jauh lebih berbahaya.

Menanggapi eskalasi konflik yang semakin tinggi pemerintah Turki yang pada masa itu diwakili oleh Erdogan selaku Gubernur Istanbul dan beberapa politisi lainnya membuka pembicaraan dengan Ocallyan. Komunikasi ini kemudian menghasilkan kesepakatan gencatan senjata kedua dimulai sejak 21

Maret 2013. Gencatan senjata kedua juga tidak berangsur baik, tetap terjadi pemberontakan dan perlawanan terhadap aparat militer walaupun dengan tingkat konflik yang minor. Sekali lagi, gencatan senjata kedua berakhir pada 25 Juli 2015 alasan terbesar adalah karena milisi Kurdi merasa bahwa mereka tetap tidak mendapatkan kebebasan secara sepenuhnya di Turki dan tetap dianggap sebagai organisasi radikal dan ekstrimis. Hal ini ditanggapi PKK dengan melakukan pembunuhan pada salah satu anggota AKP di Tenggara Turki dan kemudian kembali melakukan serangan bom.

Pada masa tersebut adalah 2 tahun pasca menjabatnya Erdogan sebagai Presiden Turki. Hal ini tentu menciderai periode kepemimpinannya dan membuatnya ikut mendapat keabadian warisan konflik PKK.

C. Hubungan Turki dan PKK pada masa pemerintahan Erdogan

Recep Tayyip Erdogan terpilih sebagai Presiden Turki pada tahun 2014 menggantikan Presiden sebelumnya yakni Abdullah Gul yang berasal dari partai yang sama yakni AKP (Adalet ve Kalkinma Partisi) atau Partai Keadilan Pembangunan setelah menggulirkan perolehan suara dengan presentase sebanyak 52%. Kemenangan sang Perdana Menteri yang menjadi Presiden kala itu dipengaruhi beberapa faktor, selain faktor internal yakni kepribadian dan integritas Erdogan, faktor lain juga berpengaruh seperti krisis ekonomi serta

korupsi yang merajarela. Erdogan diharapkan mampu menjadi titik balik kebangkitan Turki.²⁹

Sejalan dengan para pemimpin sebelumnya, perspektif ideologis Erdogan berkembang serupa, ia menjadi suksesor ideologi sekuler Turki namun dengan metode dan pendekatan yang jauh lebih humanis dan demokratis. Jika sebelumnya para pemimpin Turki secara absolut memisahkan hubungan agama dan negara, maka Erdogan mencoba menggabungkan Ideologi sekuler dengan nilai-nilai Islam, berkaca pada pengaruh agama tersebut yang tidak bisa dipisahkan dari perjalanan Turki. Namun nilai yang dinamakan Post-Islamis disini bukan tentang meneggakan syariat Islam secara menyeleruh, melainkan lebih cenderung pada mewujudkan nilai-nilai kebaikan universal dalam Islam untuk menciptakan *Good and Clean Government*.

Visi Erdogan yakni Demokrasi, Transformasi, Reformasi Turki atau “*Yeni Atılım Dönemi: Demokrasi, Değişim, Reform*”, hal ini berarti bahwa Erdogan akan merubah wajah Turki secara keseluruhan. Demokrasi yakni menyangkut pemberian hak serta kesamaan antar sesama masyarakat dalam sektor publik, Transformasi adalah tentang arah kebijakan politik domestik dan internasional Turki, salah satunya yakni memberikan perimbangan antara kerjasama dengan negara-negara Barat dan negara kawasan Timur Tengah, setelah sebelumnya kerjasama hanya dilakukan negara-negara Timur Tengah serta Reformasi yakni terkait

²⁹ Telegraph, World News : Turkey Most Powerful President since Ataturk, diakses dari <http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/turkey/11548369/Turkeys-most-powerful-president-since-Ataturk-A-profile-of-Recep-Tayyip-Erdogan.html> diakses pada 5 Desember 2017

sistem administratif dan fiskal dari Erdogan yakni menekan jumlah korupsi dan meningkatkan integritas pemerintah.³⁰

Terpilihnya Erdogan juga berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada eksistensi Kurdi dan PKK di Turki. Erdogan diproyeksikan lebih mampu menyelesaikan konflik antara militan PKK dan Turki, hal ini disandarkan pada upayanya yang secara terang-terangan membuka dialog dengan Ocallyan di penjara tempat Ocallyan ditahan mengenai perundingan perdamaian tahun 2013 saat ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri Turki. Terbukti pendekatan humanisnya mampu menarik perhatian Ocallyan yang berujung pada kesepakatan gencatan senjata untuk yang kedua kali yang disebut “*Çözüm süreci*” atau “*Solution Process*” saat ia masih menjabat sebagai Perdana Menteri.

Saat menjabat sebagai Presiden ditahun 2014, Erdogan bersikap aktif dan terbuka pada Kurdi non kombatan melalui kebijakannya untuk memisahkan Kurdi kombatan dan non kombatan agar tidak ada lagi korban sipil yang berjatuh. Kurdi diberikan tempat dan peluang yang lebih luas, bukan hanya akses dan kesempatan pendidikan, kebudayaan melainkan juga jalur-jalur politik. Hal ini dibuktikan dengan tumbuh pesatnya pendukung Partai Demokratik Rakyat atau *Halkların Demokratik Partisi* di Turki. Erdogan beranggapan bahwa keputusan ini akan membawa perubahan-perubahan positif pasca gencatan senjata yang sudah bertahan selama 1 tahun tersebut.

³⁰ TCCB, Presidency of the Republic of Turkey : Recep Tayyip Erdogan, diakses dari <https://www.tccb.gov.tr/en/receptayyip Erdogan/biography/> diakses pada 5 Desember 2017

Erdogan juga mempertimbangkan jumlah Kurdi terbanyak adalah di Turki sehingga tentu sedikit banyak akan berpengaruh terhadap posisinya sebagai seorang Presiden dalam pemilihan umum. Populasi Kurdi Turki adalah 15 sampai 20 juta orang atau sekitar 19% - 25% dari seluruh populasi masyarakat Turki yang berjumlah 81,246,639 jiwa. Sebuah angka yang sangat signifikan bagi gerombolan manusia yang dulunya adalah imigran.

Sayangnya prediksi sang pemimpin salah, rentetan teror menghujani daratan Turki yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, berbagai kerusakan masif dan kerugian besar. Hal ini tentu sangat mempengaruhi kestabilan domestik Turki, mulai dari sosial, ekonomi, hingga kestabilan politik.

Terlebih ditahun 2015 militan PKK memutuskan secara sepihak kesepakatan gencatan senjata dan melakukan berbagai aksi menyerang di Turki. Kemenangan HDP di pemilihan umum dengan memperoleh 13% dan melampaui *threshold* untuk masuk ke parlemen semakin menambah kekhawatiran Erdogan dan masyarakat Turki akan rancangan propaganda yang telah disiapkan Kurdi. Beberapa pimpinan HDP yang diindikasikan terlibat dalam teror dan gerakan sadis PKK dicebloskan kedalam penjara, mereka adalah Selahattin Demirtas serta 10 anggota partai HDP lainnya.³¹

Sejak saat itu Erdogan merasa dikhianati oleh Abdullah Ocalan dan gerilyawan PKK. Kurdi bukan hanya dianggap sebagai musuh pemerintah, melainkan telah menjadi musuh bersama seluruh

³¹ The Guardian, Turkey : Turkey Arrest Pro Kurdish Party Leaders, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/04/turkey-arrests-pro-kurdish-party-leaders-mps> diakses pada 5 Desember 2017

warga Turki. Kesepakatan gencatan yang melalui proses perundingan panjang, tawar menawar dan *lobbying* yang diharapkan mampu menengahi peliknya konflik antara Kurdi dan Turki diciderai dengan serangan teror secara berulang kali.

Ditengah kondisi darurat teror yang diberlakukan oleh pemerintah, kegentingan bertambah dikala Kurdi di Irak melaksanakan referendum pemisahan diri pada 25 September.³² Hal ini diyakini tidak lepas dari peran serta Partiya Karkeren Kurdistan yang dianggap membantu mewujudkan referendum tersebut. Selain itu hal ini juga dikhawatirkan akan membakar semangat Chauvinisme para Kurdi di Turki untuk melakukan hal yang sama.

Pemerintah Turki bergegas dan berbenah, rasa was-was akan terjadi teror lanjutan tentu menghinggapi benak masyarakat sipil dan para birokrat Turki karena sejatinya PKK akan terus menunjukkan taringnya kepada Turki hingga tuntutan mereka yakni merdeka dapat terpenuhi.

³² France 24, Middle East : Iraq Kurdish Parliament Approves September 25 Kurdistan Independence Referendum, diakses dari <http://www.france24.com/en/20170915-iraq-kurdish-parliament-approves-september-25-kurdistan-independence-referendum> diakses pada 5 Desember 2017